

SIKLUS TUJUH TAHUNAN EKONOMI INDONESIA (1931-1966-2001-2036)

Mubyarto

Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

Indonesian economy has been experiencing 7 year cycle starting the year of independence in 1945. In a larger cycle, the economic and political crises took place every 35 years (5 x 7 years), hence the crisis of 1931, 1966, and 2001. There are also 3 x 7 years historical "repeat" in the national debate of Indonesian economy i.e., the year of 2001, 1980, and 1959. The year of 1959 was important in Indonesian economic history because it was the year when Indonesia decided to return to the 1945 Constitution after the "konstituante" (Constitution Making Body) failed to make a new constitution. It is important to note that social justice for the whole Indonesian people is the final goal of national development where equity and justice is observed and poverty is eradicated. Indonesian economy can best be analyzed by moral economy and transdisciplinary approach rather than strict neoclassical economy theory. That is why many economists were surprised by the coming of Indonesias monetary crises.

Keywords: *economic cycle, economic reform, peoples economy.*

PENDAHULUAN

Salah satu gejala atau sifat sistem ekonomi pasar adalah adanya siklus atau "konjungtur" kegiatan ekonomi, baik siklus jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Di Indonesia kami pernah mengemukakan adanya siklus 7 tahunan sejak Indonesia merdeka sampai tahun 2001, dan tahap terakhir (1994-2001) kami sebut sebagai tahap Menuju Ekonomi Kerakyatan¹⁾. Selama 56 tahun merdeka, telah kita lewati 8 kali siklus 7 tahunan sebagai berikut.

- 1945 – 1952 Ekonomi perang
- 1952 – 1959 Pembangunan ekonomi nasional
- 1959 – 1966 Ekonomi komando
- 1966 – 1973 Demokrasi ekonomi
- 1973 – 1980 Ekonomi minyak

1980 – 1987 Ekonomi keprihatinan

1987 – 1994 Ekonomi konglomerasi

1994 – 2001 Menuju ekonomi kerakyatan

Jika ekonomi konglomerasi 1987-1994 jelas dirangsang kebijakan deregulasi dan liberalisasi khususnya kebijakan "Pakto 88", tahap menuju ekonomi kerakyatan ternyata harus dilalui melalui "cobaan Tuhan" berupa krisis moneter mulai Agustus 1997. Akan kita lihat di bawah apakah gerakan reformasi yang kini sedang digalakkan akan benar-benar merupakan jawaban tepat untuk melancarkan jalan pewujudan ekonomi kerakyatan.

SEJARAH EKONOMI BERULANG SETIAP 35 TAHUN

Tigapuluh lima tahun yang lalu (1966) Indonesia mengalami krisis ekonomi seperti halnya sekarang yang mungkin baru akan teratasi secara penuh 4 tahun mendatang (2005). Jika 35 tahun mendatang (2036) terjadi

¹⁾ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, 2000, hal. 222.

krisis ekonomi serupa, maka pada perayaan 1 abad kemerdekaan Indonesia (2045), ekonomi Indonesia, Insya Allah, akan dalam kondisi pulih kembali. **Reformasi** dewasa ini yang dianggap sebagai keharusan untuk mengatasi krisis yang sudah menjadi bermuka banyak (multidimensi) tidak saja ada yang terbukti tidak tepat, tetapi bahkan ada yang justru cenderung “menjauhkan” dari tujuan yang telah ditetapkan bersama, yaitu **masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila**.

Kita dapat menengok kembali 35 tahun lalu, pada waktu mahasiswa yang tergabung dalam KAMI FE-UI mengadakan seminar “revolusioner,” yang dengan bahasa sekarang adalah “reformatif” yaitu “menolak segala praktek keliru yang dilakukan Orde Lama”. Yang aneh, dalam rangka menolak praktek-praktek Orde Lama yang “etatistik”, ideologi ekonomi yang kemudian dianjurkan secara spesifik tidak lain adalah **sosialisme** (yang berlandaskan) **Pancasila**. Maka dari itu adalah menarik membaca kembali ceramah-ceramah para teknokrat ekonomi di hadapan mahasiswa FE-UI waktu itu yaitu Profesor-profesor Subroto, Selo Soemardjan, Ali Wardhana, Moh. Sadli, Emil Salim, Fuad Hassan, Widjojo Nitisastro, dan Radius Prawiro. Satu-satunya pakar ekonomi yang sudah menjadi menteri waktu itu adalah Drs. Frans Seda yang menjabat Menteri Perkebunan. Seminar dipimpin mahasiswa Mustopadjaja, Amir Imam Poero, dan Sjahrir.²⁾

Dr. Emil Salim memberi judul ceramahnya **Memبina Ekonomi Pancasila** dengan latar belakang analisis ekonomi politik Marxisme, dan sekaligus menyangsikan segala kebijaksanaan ekonomi pemerintah waktu itu yang dianggap “kurang menunjukkan kematangan berpikir”. Prof. Widjojo sendiri menyebutnya sebagai “kebijaksanaan yang tidak bijaksana”.³⁾

... penanggulangan inflasi harus juga diselenggarakan di bidang mental. Nilai-nilai dan norma-norma yang bergeser itu harus ditertibkan kembali dalam rangka usaha mengkonkritkan **Pancasila** dalam sikap tindakan dan cara hidup sehari-hari.

... ada baiknya, apabila kita bertanya pada diri sendiri **how to be a good Pancasilaist** dan mencoba mempraktekannya dalam hidup sehari-hari.

... selama ini perhatian dan kepentingan golongan kecil saja yang dikejar, demi merugikan kepentingan golongan rakyat kecil, dan ini di bawah selubung dalil-dalil ekonomi dan rumusan yang sok ilmiah.

... segala dalil-dalil ekonomis teknis seharusnya **berlandaskan Pancasila**, Deklarasi Ekonomi dan Amanat Berdikari.

Hanya dengan itikad jujur dari true believers Pancasilais-Manipolis ini bisa diharapkan terwujudnya strategi dasar ekonomi kita menuju ekonomi dan negara sosialis Indonesia, sebagai manifestasi ajaran-ajaran Bung Karno.

Demikian dari 2 kutipan ceramah tersebut kiranya jelas bahwa di Indonesia telah terjadi 3 kali pengulangan sejarah “krisis ekonomi” masing-masing dalam periode 35 tahun. Namun yang menarik, jika “**pembaruan** kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan” tahun 1966 sangat kental dengan upaya membela orang kecil dan ekonomi rakyat yang telah menjadi korban sistem ekonomi komando (etatisme 1959-66), dengan mengacu pada ideologi Pancasila, kini 35 tahun kemudian, ketika ekonomi rakyat telah benar-benar digusur secara sangat menyakitkan oleh ekonomi konglomerat, dalam gerakan **reformasi** ideologi Pancasila justru tidak lagi dianggap relevan, dan istilah ekonomi rakyat oleh sejumlah pakar ekonomi dianjurkan untuk “dihindarkan karena berbau komunis, atau

²⁾ Seminar KAMI, *Jalur Baru Sesudah Runtuhnya Ekonomi Terpimpin*, Sinar Harapan, 1984

³⁾ Widjojo Nitisastro, *Kebijaksanaan Ekonomi dan Keuangan Yang Tidak Bijaksana*, Seminar KAMI,

idem; Widjojo Nitisastro (hal. 150) dan Emil Salim (hal. 118-121).

telah terlalu jauh disalahgunakan oleh Orde Baru”.

Perubahan orientasi pemikiran yang drastis dari pakar-pakar ekonomi dalam 35 tahun menimbulkan pertanyaan apa yang menjadi penyebabnya. Mungkin salah satu jawabannya adalah karena sekarang konstelasi ekonomi dan politik dunia telah berubah, yaitu **liberalisasi** dan **globalisasi** telah begitu nyata, dan **komunisme** telah bangkrut pada tahun 1989-1991, sehingga sistem **kapitalisme** pasar bebas telah menjadi paham tunggal yang menguasai dunia. Maka ideologi Pancasila yang sosialis-ekonomis tidak lagi dianggap patut untuk dipertahankan. Kapitalisme sebagai paham pemenang “tidak lagi (dianggap) serakah dan tidak dianggap berniat menguasai, karena **sudah** menguasainya”.

Tentu orang tetap bertanya-tanya apakah memang paham yang sudah menguasai dan mendominasi dunia tidak lagi bersifat serakah, atau sebaliknya dapat lebih serakah lagi. Bahwa sejumlah LSM tingkat dunia mengadakan demonstrasi menentang pertemuan WTO, IMF, dan Bank Dunia di Seattle, Praha, Davos, dan Washington DC, menunjukkan kekawatiran masih bisa berlanjutnya sistem eksploitatif atas negara-negara berkembang.

Kesimpulan ini diperkuat oleh hasil penelitian UNU (United Nations University) yang berpusat di Tokyo yang mengusulkan perombakan total IMF dan Bank Dunia, yang tidak lagi dianggap cocok untuk membantu negara-negara berkembang.

It is time to reform the reformers. The World Bank should stop lending money and instead should transform itself into an institution more concerned with development in poor countries. The IMF should play a constructive role in managing and stabilizing the international financial system, not only through crisis management but also through crisis prevention.⁴⁾

Kesimpulan kita dari analisis di atas adalah bahwa sejarah ekonomi Indonesia telah berulang setiap 35 tahun, dan 35 tahun kebelakang sebelum 1966 adalah tahun 1931, yaitu saat depresi dunia juga telah menghancurkan ekonomi ekspor Indonesia yang waktu itu dikuasai kapitalis-kapitalis Belanda. Maka sudah sepantasnya kita menerawang 35-45 tahun ke depan yaitu ke tahun 2036. Periodisasi ekonomi Indonesia mungkin dapat “diramal” ke depan sbb:

I. 1945 – 1966 (3 x 7 tahun)	Pembangunan bangsa (Nation building), belum ada pembangunan ekonomi
II. 1966 – 2001 (5 x 7 tahun)	Ekonomisme (Pembangunanisme) diakhiri dengan krisis moneter 1997
III. 2001 – 2036	Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan & Kekeluargaan
(2001 – 2008)	Perjuangan dan Pergulatan Menuju Sistem Ekonomi yang moralistik dan manusiawi
(2008 – 2015)	
(2015 – 2022)	Sistem Ekonomi Kerakyatan yang Nasionalistik terwujud
(2022 – 2029)	
(2029 – 2036)	Krisis Ekonomi Global seratus tahun setelah Depresi sembilan belas tigapuluhan
IV. 2036-2045	Sistem Ekonomi Pancasila terwujud

⁴⁾ UNU Calls for Overhaul of UN, IMF and World Bank, **Jakarta Post**, May 5, 2001, hal. 16.

REFORMASI EKONOMI DAN KAITANNYA DENGAN REFORMASI POLITIK, HUKUM, DAN SOSIAL-BUDAYA

Pada tahun 1993 terbit buku Bank Dunia “*The East Asian Miracle*”, yang mengisahkan “keajaiban” 8 negara Asia Timur dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Orang Indonesia yang waspada akan sulit menerima pujian yang berlebihan ini, yang dengan pembacaan secara kritis memang terlihat kurang disertai data-data empirik yang akurat dan bahkan cenderung “spekulatif”. Memang benar bahwa Indonesia telah berhasil menurunkan pertumbuhan penduduk secara drastis, dan berhasil mencapai swasembada pangan (beras) pada tahun 1984. Keberhasilan pengendalian inflasi antara lain melalui anggaran berimbang, meskipun tidak salah namun sebenarnya sangat kurang meyakinkan, karena defisit anggaran masih selalu terjadi yang kemudian ditutup dengan bantuan luar negeri. Dapat ditunjukkan pula bahwa pengendalian inflasi sebenarnya berhasil lebih karena pemberian subsidi yang besar pada komoditi pangan khususnya beras, minyak, listrik dll. Ini semua merupakan beban negara, yang dalam bahasa ekonomi disebut “ekonomi biaya tinggi” yang pasti “tidak efisien”.

Reformasi atau pembaruan sudah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia yaitu berupa kelanjutan, peningkatan, perluasan, dan pembaruan. Keempat kata ini, termuat dalam Bab I (Pendahuluan) GBHN 1993-1998.

Mengapa masalah pembaruan atau reformasi ini perlu kita soroti secara khusus? Sebabnya adalah karena dalam rangka mengatasi krisis moneter/ekonomi dewasa ini kita telah sepakat dengan IMF untuk melaksanakan berbagai kebijakan reformasi yang sudah ditanda-tangani oleh Presiden Soeharto 15 Januari 1998, dan sesudahnya oleh Menteri-menteri EKUIN.

Alasan lain adalah, di dalam masyarakat sering timbul kesan seakan-akan ada

perbedaan pendapat antara masyarakat, termasuk mahasiswa, yang menghendaki reformasi (ekonomi, politik, dan hukum) dengan pemerintah (Orde Baru waktu itu), yang menolaknya. Dengan menyebutkan secara jelas berbagai kebijakan reformasi, pemerintah wajib melaksanakan reformasi yang sudah diamanatkan oleh rakyat.

Berhubung dengan itu menjadi jelas bahwa tidak ada perbedaan pendapat bahwa reformasi memang perlu, dan harus dilaksanakan “dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kemajuan dan sikap serta tekad kemandirian bangsa”. Dengan demikian, masalah yang kita hadapi dapat disederhanakan menjadi pemahaman isi reformasi/pembaruan yang harus dilakukan, dan bagaimana melaksanakannya.

Untuk menemukenali isi pembaruan dan bagaimana melaksanakan pembaruan yang dimaksud, penegasan berikut perlu dipelajari sungguh-sungguh.

Hasil pembangunan harus dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Kesejahteraan yang merata dan berkeadilan akan meningkatkan ketahanan nasional yang selanjutnya akan meratakan jalan bagi generasi yang akan datang untuk mencapai masyarakat maju, sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila. (TAP XXIII/MPRS, 1966)

Dengan penegasan ini jelas ada keinginan kuat yang telah menjadi cita-cita pada pendiri negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu dapat terwujudnya masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang dinyatakan dalam kesejahteraan yang merata dan berkeadilan atau masyarakat yang adil dan makmur. Masyarakat yang adil dan makmur adalah masyarakat yang taraf kehidupannya serba berkecukupan (tidak miskin), dan tidak ada kesenjangan kesejahteraan yang besar antara warga negara.

Masalah ekonomi jangka pendek yang kita hadapi adalah bagaimana keluar dari krisis moneter sekarang. Krisis yang mungkin lebih tepat disebut sebagai “cobaan” atau “ujian” Tuhan ini, tidak mungkin kita anggap ringan, tetapi memang amat berat.

Sebagai umat beragama yang percaya pada aneka rupa peringatan, cobaan, dan ujian Tuhan, maka yang pertama-tama perlu kita lakukan adalah mengakui keteledoran, kealpaan, dan kesalahan yang selama ini telah kita lakukan. Hanya dengan cara menyadari hal-hal ini kita dapat menemukan secara tepat berbagai akar masalahnya, dan kemudian memperbaikinya.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah), tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami), kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya (Al Israa, ayat 16)

Salah satu kelemahan lain dari bangsa Indonesia adalah kegemaran disanjung atas keberhasilan-keberhasilan, dan ketidak-senangan menerima dikritik. Jika kita terlalu sering disanjung dan dimanja dengan segala kenikmatan duniawi, maka itu berarti merupakan awal dari kealpaan dan keterlanjuran.

Sudah disinggung di atas bahwa pada tahun 1993, pada saat Indonesia memasuki PJP II dan Repelita VI, terbit satu buku “laporan penelitian” Bank Dunia “*The East Asian Miracle*”, yang bagi mereka yang waspada jelas merupakan “perangkap” berbagai keterlanjuran yang kemudian kita perbuat. Pada tahun itu juga sebenarnya sudah diperingatkan agar kita berhati-hati.

Pembangunan telah berhasil meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan rakyat pada umumnya walaupun masih ada ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang

menuntut usaha yang sungguh-sungguh untuk mengatasinya, agar tidak berkelanjutan dan berkembang ke arah keangkuhan dan kecemburuan sosial. (GBHN 1993-1998)

Pernyataan keras dari rakyat ini melalui MPR tidak cukup memperoleh perhatian, rupanya karena Bank Dunia menganggap perekonomian Indonesia sudah dianggap salah satu dari “*East Asian Miracle*” yang diberi definisi sebagai kombinasi dari “*rapid, sustainable growth with highly equal income distribution*”. Pada saat buku Bank Dunia ini mulai menyebar, sudah ada yang mengingatkan bahwa Indonesia tidak seharusnya dimasukkan dalam “perangkap keajaiban” ini. Dari bacaan kita secara kritis atas laporan Bank Dunia ini sungguh amat sulit menemukan alasan-alasan ‘keajaiban’ Indonesia, kecuali dalam keberhasilan penurunan pertumbuhan penduduk dan keberhasilan mencapai swasembada beras pada tahun 1984, serta “konsistensi” Indonesia memertahankan APBN yang selalu berimbang. Juga Indonesia dipuji sebagai “pintar” memanfaatkan bonanza minyak, dan dalam menyesuaikan kebijakan ekonomi makro pada saat harga minyak anjlog tahun 1982-1986. Untuk selebihnya ukuran keajaiban banyak didasarkan pada ukuran “konvensional” yaitu pertumbuhan ekonomi yang “berkelanjutan”, meskipun jelas ada periode-periode pertumbuhan ekonomi amat rendah (1982 = 2,2%), atau inflasi amat tinggi (1972, 1974).

Juga amat tidak meyakinkan “pembenaran” tentang tidak adanya kesenjangan dalam pembangunan melalui tanggapan Presiden bahwa demokrasi ekonomi telah diperhatikan oleh ISEI:

The principle of shared growth is also explicit in Indonesia, where President Soeharto advocates ‘economic democracy ... “I hope that ISEI’s findings on the system of Economic Democracy receives as much public exposure as possible and

*that all levels of society become involved in the discussion of this vital issue”.*⁵⁾

Prestasi-prestasi dari pemerintah Indonesia yang dianggap menjadi “kunci keajaiban” menyangkut komitmen untuk mengatasi inflasi, mempertahankan anggaran berimbang, dan komitmen pada keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Soeharto's new order government ascended to power with an explicit commitment to fight inflation and develop infrastructure, particularly in the rural area ...

In Indonesia, too, technocrats keep a tight rein on the budget. Under Soeharto, a balanced budget has been the corner stone of government financial policy...

*Armed with these instruments, the finance ministry has established a macroeconomic environment favorable to growth*⁶⁾

Tentang kesenjangan dan ketidakadilan yang berkaitan dengan pertumbuhan perusahaan-perusahaan konglomerat, laporan khusus tentang Indonesia cukup tajam. Namun rupanya pujian ini, sekali lagi, lebih kita perhatikan ketimbang kritik.

A source of increasing concern in recent years has been the relatively high concentration of ownership and market power in the modern business sector in the hands of large business groups or conglomerates. The dominance of the conglomerates raises issues of both equity (equal access to market opportunities) and efficiency (removal of business to competition). Effectively and efficiently dealing with this issue will be an important test of policies to foster broad participation in private sector development.

KEMBALI KE EKONOMI PANCASILA

Pancasila dan UUD 1945 (khususnya pasal 33) mengatur bahwa negara yang terus-menerus berusaha memakmurkan dan mensejahterakan rakyat secara maksimal, harus menguasai cabang-cabang produksi vital dan sumber daya ekonomi nasional. Artinya, dunia usaha swasta (nasional maupun asing) dan perorangan tidak seyogyanya lebih berkuasa dari pada negara. Ketentuan pembatasan atas kekuasaan perorangan dan usaha swasta inilah yang rupanya tanpa disadari dalam proses deregulasi yang “kebablasan” telah dilanggar. Misalnya dalam Repelita VI dicantumkan (dengan bangga) bahwa 73% investasi telah “disumbang” oleh dunia usaha swasta. Sasaran investasi dunia usaha swasta yang jauh melebihi investasi pemerintah ini adalah untuk “mengejar” pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 6,2% per tahun, yang kemudian malahan direvisi ke atas menjadi 7,1%.

Adalah menarik untuk meneliti berapa bagian dari investasi swasta yang “dikuasai” usaha-usaha swasta secara penuh, berapa yang dikuasai bersama antara usaha swasta dan pemerintah, dan berapa yang merupakan hasil kerjasama “kolusif” antara perorangan dan pemerintah, baik secara terang-terangan atau secara terselubung. Kerjasama kolusif inilah yang dituntut masyarakat untuk diberantas, karena terkait dengan praktek-praktek korupsi termasuk yang berbentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni yang merugikan masyarakat.

Reformasi ekonomi Indonesia baik yang sudah dimulai sejak awal Repelita VI melalui program pengembangan ekonomi rakyat, maupun gerakan “liberalisasi” bersama atau dengan bantuan IMF dalam kaitannya dengan pemecahan masalah krisis moneter, merupakan topik amat penting menjelang pelaksanaan “Repelita VII”. Reformasi ekonomi, dengan atau tanpa reformasi politik dan hukum, merupakan tuntutan masyarakat luas untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang sudah mencapai tahap

⁵⁾ World Bank, *The East Asian Miracle*, 1993, op.cit, p.158.

⁶⁾ World Bank, *idem*, op.cit. p. 171, 172

sangat menghawatirkan pada akhir Repelita V (1993).

Reformasi ekonomi (*economic reform*) menjadi agenda politik penting karena pembangunan ekonomi selama PJP I (1969-1994) yang telah berhasil mengangkat Indonesia dari posisi negara miskin menjadi negara berpendapatan menengah, dengan pendapatan perkapita riil penduduk naik 4 kali, menimbulkan ketimpangan yang serius dalam pembagiannya, dan sekaligus masih menyisakan 13% penduduk dalam kondisi kemiskinan absolut. Kehidupan masyarakat tidak akan tenteram selama kondisi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial berkepanjangan.

Selama 3 tahun Repelita VI, tingkat kemiskinan sebenarnya sudah menurun cukup tajam dari 25,9 juta menjadi 22,5 juta, atau dari 13,7% menjadi 11,4%. Penurunan ini hampir 3 kali lebih cepat dibanding laju penurunan 3 tahun sebelumnya (1990-1993). Meskipun tingkat kemiskinan menurun dengan cepat, namun belum ada tanda-tanda berkurangnya ketimpangan dalam pembagian pendapatan nasional. Juga ketimpangan antardaerah dan ketimpangan antara sektor industri dan sektor pertanian bertambah serius.

Ketimpangan Antarsektor: Industri dan Pertanian. Ketimpangan jenis ini merupakan masalah lama dan sudah menjadi bahan kajian para pakar di banyak negara. Upaya memajukan pertanian telah banyak dilakukan baik berupa program-program pelayanan yang diarahkan pada kelompok-kelompok petani dan nelayan kecil, maupun berupa pengenalan teknologi unggul seperti revolusi hijau. Revolusi hijau yang dimulai pada awal tujuh puluhan yang mampu menaikkan produksi beras secara “luar biasa” sehingga mengakibatkan Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984, ternyata belum mampu mengatasi ketimpangan (dan dualisme sosio-ekonomi) di perdesaan, dan juga tidak mampu pemeratakan kemajuan antara sektor pertanian dan industri.

Ketimpangan Antardaerah. Dalam sejarah, ketimpangan antardaerah terjadi antara wilayah Jawa dan Luar Jawa, dan sejak kemajuan Propinsi Bali yang luar biasa, menjadi ketimpangan antara “Jawa-Bali” dengan “Luar Jawa-Bali”. Dalam pada itu, kini mulai menarik analisis ketimpangan pembangunan antara wilayah Indonesia bagian barat yang jauh lebih maju dengan wilayah Indonesia bagian timur yang relatif tertinggal. KBI mencakup 32% dari wilayah dan 81% dari jumlah penduduk Indonesia, sedangkan wilayah Jawa-Bali mencakup 7% dari wilayah dan 60% dari jumlah penduduk keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi Jawa-Bali (1975-1985) adalah lebih tinggi (9,2% per tahun) dibanding 6,5% per tahun untuk wilayah “Luar Jawa-Bali”.

Ketimpangan Antargolongan Ekonomi. Ketimpangan jenis ini adalah yang paling berat, dan dalam sistem ekonomi yang cenderung “liberal-kapitalistik”, perekonomian yang tumbuh “terlalu cepat” (*too rapid growth*) justru mengakibatkan ketimpangan menjadi makin parah dan makin sulit diatasi. Setelah kebijakan deregulasi mulai dikembangkan pada pertengahan tahun delapan puluhan, terjadi ketimpangan serius antara subsektor “ekonomi konglomerat” (kapitalistik) dan subsektor “ekonomi rakyat” (tradisional). Gini ratio pengeluaran per kapita penduduk naik dari 0,32 (1990) menjadi 0,34 (1993), dan 0,36 (1996). Untuk penduduk di perdesaan Gini Ratio turun dari 0,31 menjadi 0,27 (1976-1996), sedangkan di perkotaan tetap (0,36) meskipun sempat turun menjadi 0,32 pada periode resesi ekonomi 1984-1987. Gejala ini sangat memprihatinkan, dan MPR pernah mengingatkan dalam bahasa yang relatif keras bahwa “jika ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial tidak dapat dicegah secara sungguh-sungguh, maka dikawatirkan akan terjadi **keangkuhan** dan **kecemburuan** sosial”.

Kemiskinan. Satu bentuk ketimpangan yang paling serius dan paling jelas adalah

kemiskinan absolut, karena mereka yang miskin absolut tidak dapat hidup secara manusiawi sesuai sila 2 Pancasila, *Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*. Kemiskinan ini sebenarnya sudah mulai teratasi selama 3 tahun pertama Repelita VI

sampai Indonesia mengalami krisis moneter mulai Agustus 1997 yang tidak saja memperlambat upaya-upaya menghapus kemiskinan, tetapi telah “memiskinkan kembali” penduduk yang sudah berada di atas ambang batas kemiskinan.

Tabel 1 Indonesia: Garis Kemiskinan, Taksiran Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin, 1976-1999

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)		Persentase Penduduk Miskin				Jumlah Penduduk Miskin (Juta orang)			
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Total	Persen Perubahan	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perubahan Absolut (juta)
1976	4.552	2.849	30,8	40,4	40,1	-	10,0	44,2	54,2	-
1978	4.969	2.981	30,8	33,4	33,3	-6,8	8,3	38,9	47,2	-7,0
1980	6.831	4.449	29,0	28,4	28,6	-4,7	9,5	32,8	42,3	-4,9
1981	9.777	5.877	28,1	26,5	26,9	-1,7	9,3	31,3	40,6	-1,7
1984	13.730	7.746	23,1	21,2	21,6	-5,2	9,3	25,7	35,0	5,6
1987	17.381	10.294	20,1	16,1	17,4	-4,2	9,7	20,3	30,0	5,0
1990	20.614	13.295	16,8	14,3	15,1	-2,3	9,4	17,8	27,2	-2,8
1993	27.905	18.244	13,4	13,8	13,7	-1,4	8,7	17,2	25,9	-1,3
1996	38.246	27.413	9,7	12,3	11,3	-2,3	7,2	15,3	22,5	-3,4
1996a	42.032	31.366	13,6	19,9	17,7	-	9,6	24,9	34,5	-
Des. 1998	96.959	72.780	21,9	25,7	24,2	6,5	17,6	31,9	49,5	15,0
Feb. 1999	92.409	74.272	19,5	26,1	23,5	-0,7	15,7	32,7	48,4	-1,1
			(19,4)	(26,0)	(23,4)		(15,6)	(32,4)	(48,0)	
Ags. 1999	89.845	69.420	15,1	20,2	18,2	-5,3	12,4	25,1	37,5	-10,9
			(15,0)	(20,0)	(18,0)		(12,3)	(24,8)	(37,1)	

Catatan: 1. Angka-angka tanpa Timor Timur

2. Angka-angka 1996a dan Agustus 1999 menunjukkan standar definisi kebutuhan minimum pangan dalam garis kemiskinan.

Sumber: Puguh Irawan, dkk, *Social Safety Analysis and Recommendations: Prospect in Indonesia*, BPS, 2001.

Reformasi atau pembaruan bidang ekonomi adalah upaya perbaikan dalam kebijakan ekonomi baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, yang berakibat pada meningkatnya efisiensi ekonomi nasional dan sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat. Perekonomian nasional yang efisien adalah yang tidak boros dalam pemanfaatan sumber-sumber daya (*resources*), dan sekaligus berkeadilan. Dalam perekonomian yang adil aturan-aturan main

berdasar etik dan moral yang telah disepakati benar-benar dipatuhi oleh semua pelaku ekonomi.

Keadilan ekonomi adalah aturan main tentang hubungan-hubungan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip etik, prinsip-prinsip mana pada gilirannya bersumber pada hukum-hukum alam,

*hukum Tuhan, dan sifat-sifat sosial manusia.*⁷⁾

Dalam sejarah perekonomian Indonesia sejak kemerdekaan, telah berkali-kali terbukti bahwa efisiensi ekonomi bisa turun menjadi amat rendah untuk waktu yang lama tanpa menimbulkan keresahan sosial, tetapi adanya ketidakadilan ekonomi segera diprotes masyarakat, dan atau dituntut agar segera diambil langkah-langkah untuk meniadakannya. Dengan perkataan lain, masyarakat rupanya tidak sulit mentoleransi inefisiensi atau ekonomi biaya tinggi, tetapi tidak membiarkan ketidakadilan berlangsung untuk waktu lama.

Reformasi ekonomi mempunyai tujuan kembar yaitu meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dan sekaligus menghapus berbagai ketidakadilan ekonomi dengan tujuan akhir terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Di samping inefisiensi dan ketidakadilan, pembangunan nasional harus berkelanjutan, yaitu tidak boros atau “kebablasan” dalam penggunaan sumber daya alam, yang memberikan nikmat berlebihan pada generasi sekarang tetapi “menyusahkan” generasi mendatang.

Reformasi ekonomi Indonesia adalah pembaruan berbagai aturan main tentang hubungan-hubungan ekonomi dalam masyarakat. Aturan-aturan main ini secara keseluruhan dibakukan dalam sistem ekonomi Pancasila. Tersusunnya aturan main sistem ekonomi Pancasila secara baku dan mantap dewasa ini masih terus mencari bentuk dan mengalami proses. Namun bahwa sistem ini sudah masuk dalam GBHN 1998 (yang berumur sangat pendek) adalah suatu kemajuan. Bahwa kemajuan ini belum cukup ditanggapi masyarakat adalah karena munculnya badai krisis moneter secara tiba-tiba yang menggoyahkan hampir seluruh sendi-sendi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Namun kita tidak perlu menunggu badai krisis berlalu untuk mengoperasionalkan sistem ekonomi dengan paradigma baru ini dengan memperbaiki berbagai perundang-undangan dalam bidang-bidang ekonomi, keuangan, dan industri. Inilah perjuangan moral untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kebijakan ekonomi yang menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya diukur dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga harus memenuhi 4 kriteria pokok yaitu keberlanjutan (*sustainable*), kecukupan dan keadilan (*sufficiency* dan *equity*), dan efisien (*efficiency*).⁸⁾

Reformasi ekonomi berarti memperbaiki kebijakan yang keliru atau tidak tepat yang telah mengakibatkan berbagai masalah ekonomi dan sosial yang dirasakan berat oleh masyarakat. Krisis moneter dan krisis ekonomi bersumber antara lain dari kekeliruan kebijakan dalam negeri. Meskipun ada faktor luar yang ikut memperparah keadaan, tetapi yang segera harus direformasi adalah kebijakan keliru yang berasal dari kita sendiri.

Reformasi atau pembaruan harus dilakukan tidak saja untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang menyerang, tetapi yang lebih penting adalah untuk “banting stir” menerapkan sistem ekonomi yang menjamin pembagian hasil pembangunan yang lebih adil dan merata yaitu Sistem Ekonomi Pancasila. Dalam Sistem Ekonomi Pancasila pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila yang akan memperkuat jati diri dan kepribadian manusia, masyarakat, dan bangsa Indonesia.

KRISMON DAN EKONOMI RAKYAT: KASUS DESA GADINGSARI DI KABUPATEN BANTUL DIY⁹⁾

Kabupaten Bantul yang berpenduduk sekitar 780.000 tahun 2001 adalah salah satu

⁷⁾ Macpherson, C.B., 1985. *The Rise and Fall of Economic Justice*, Oxford, op.cit 2-3.

⁸⁾ Herman E Daly. *Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development*, Beacon Press, Boston, 1996.

kabupaten yang oleh Bupati disebut “dinamis” tetapi miskin. Pertumbuhan penduduknya sudah pernah turun di bawah 1% pada tahun-tahun 1980-81, 1987-90, 1992, dan 1996-99. Ekonominya tumbuh 6% per tahun selama 1994-97, tetapi pada saat krismon mengalami kontraksi -9,4% (1998), meskipun kemudian

berhasil pulih dengan pertumbuhan 1,4% tahun 1999. Dibandingkan 3 kabupaten lain dan kota Yogyakarta, kabupaten Bantul adalah “termiskin” di Propinsi DIY dengan PDRB per kapita pada harga berlaku Rp 2,7 juta tahun 1999. Tabel 1 menunjukkan PDRB Bantul dibandingkan 4 kabupaten/kota lain di DIY.

Tabel 1: PDRB Perkapita Kabupaten /Kota di Propinsi DIY, 1994-1999 (Rp Juta)

Kabupaten/Kota	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Kota Yogyakarta	3,04	3,54	4,05	4,53	5,73	6,47
Kab. Sleman	1,73	1,99	2,25	2,50	3,17	3,67
Kab. Kulon Progo	1,45	1,60	1,76	1,93	2,51	2,90
Kab. Gunungkidul	1,26	1,46	1,67	1,85	2,59	2,97
Kab. Bantul	1,19	1,36	1,53	1,70	2,32	2,70
Propinsi DIY	1,67	1,92	2,18	2,39	3,24	3,81

Catatan: atas dasar harga berlaku

Bahwa kabupaten Bantul yang tanah pertaniannya jauh lebih subur dari kabupaten Gunungkidul namun pendapatan per kapitanya lebih rendah tentu menimbulkan pertanyaan. Berbagai pertanyaan ini terjawab melalui kajian cepat (*rapid study*) di desa Gadingsari, satu-satunya desa yang tidak termasuk desa IDT dari 4 desa di kecamatan Sanden.

Desa Gadingsari. Memasuki kompleks perkantoran desa orang mendapat kesan desa Gadingsari termasuk maju, karena disamping ada ruang-ruang kantor terpisah untuk Lurah, Carik, dan Kaur-Kaur lainnya, juga ada “aula” dan masjid yang cukup baik. Seluruh penduduk desa sudah menikmati aliran listrik sehingga menurut Pak Lurah sebagian besar warga desa sudah memiliki pesawat TV. Pak Lurah menegaskan bahwa salah satu alasan desa ini tidak dikategorikan desa IDT adalah karena sudah cukup tersedia fasilitas sekolah dari TK sampai SLTA, ada Puskesmas, pasar, dan Bank (BRI Unit Desa). Di desa ini ada 6 penggilingan beras (*huller*), 6 buah truk milik warga untuk mengangkut hasil bumi dan barang-barang bangunan, 4 minibus, dan 4 mobil sedan. Bahkan dilaporkan sudah ada 142

sarjana lulusan berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta.

Wilayah desa Gadingsari sendiri adalah 8,12 km² (812 ha) dengan penduduk 11.272 orang yang berarti kepadatan penduduknya 1.388 orang/km², masih di bawah kepadatan penduduk kabupaten Bantul secara keseluruhan (1.519 orang/km²), dan juga di bawah kepadatan penduduk kecamatan Sanden (1.456 orang/km²). Kecamatan paling padat di kabupaten Bantul adalah Sewon (2.691 orang/km²), Banguntapan (2.563 orang/km²), dan Bantul (2.550 orang/km²). Dari 2.361 kk penduduk Gadingsari, 2.300 menyatakan diri sebagai **petani** (97%) meskipun 1.377 kk diantaranya (58%) adalah **buruh tani** karena tanah miliknya sangat sempit atau bahkan tidak memiliki sawah sama sekali (*landless*). Jika 58% warga adalah buruh tani atau petani tidak bertanah yang menggantungkan pendapatan keluarganya dari “memburuh” pada petani pemilik tanah, maka ada 2 implikasi penting yaitu **pertama**, pendapatan keluarga dari pekerjaan di luar pertanian pasti lebih penting seperti industri kecil dan perdagangan, dan **kedua**, ada konsentrasi pemilikan tanah pada sejumlah kecil pemilik tanah yang

kemudian memberikan **pekerjaan** kepada buruh tani tak bertanah atau petani gurem ini. Dari sawah seluas 296 ha, 236 ha di antaranya (80%) beririgasi teknis, dan dari tanah terbaik ini 75 ha (32%) adalah tanah **bengkak** yang merupakan gaji pamong desa dan tanah **kas desa** sebagai sumber penerimaan pemerintah desa. Dari TA 1999-2000 tanah kas desa seluas 28,3 ha dianggarkan penerimaan sebesar Rp 119,7 juta atau 45,3% dari total APPKD sebesar Rp 264,2 juta.

Demikian dari perhitungan sederhana ini kiranya jelas adanya ketimpangan yang serius dalam pendapatan dan dalam kehidupan ekonomi rakyat desa Gadingsari. Di satu pihak 61,7% penduduk adalah buruh tani, buruh srabutan, dan petani gurem, yang pendapatannya rata-rata hanya Rp 50.043 per kapita/bulan, 30% di bawah garis kemiskinan (Rp 70.000/kapita/bulan atau Rp. 290.000/kk/bulan), sedangkan di pihak lain 38,3% adalah perangkat desa, pengusaha swasta, dan pegawai negeri, yang berpendapatan rata-rata Rp 120.926 per kapita/bulan.

Menarik sekali mengamati tabel 2 yang menunjukkan bahwa pegawai negeri (PNS) yang sejauh ini selalu dianggap kelompok miskin, pendapatan rata-ratanya justru paling tinggi yaitu 4,3 kali pendapatan buruh tani. Ternyata disamping pendapatan tetap dari gaji bulanan, seorang pegawai negeri yang

“berpengetahuan” hampir selalu mampu menambah pendapatannya dengan usaha-usaha kecil lainnya. Sebaliknya seorang buruh tani atau buruh srabutan pendapatannya semata-mata tergantung pada kerja pertanian yang sempit dan kerja-kerja kasar lainnya.

Tabel 2: Perkiraan Pendapatan Rata-rata Penduduk Gadingsari

Pekerjaan Utama	Pendapatan/Kapita/Bulan
Buruh Tani	Rp. 38.467
Buruh Srabutan	Rp. 49.950
Petani	Rp. 61.711
Perangkat Desa	Rp. 83.888
Swasta	Rp. 115.162
Pegawai Negeri	Rp. 163.727

Sumber: Data primer hasil wawancara 53 orang penduduk

Analisis lanjut atas kehidupan ekonomi rakyat Gadingsari sekarang, hampir 4 tahun setelah krismon, lebih menarik lagi untuk dilaporkan. Meskipun 62% penduduk mengaku krismon lebih menyulitkan kehidupan mereka (dan 37% mengaku tidak terpengaruh apa-apa), namun dewasa ini hanya 20% yang melaporkan hidup “pas-pasan”, dan 48,3% mempunyai kelebihan pendapatan yang dapat ditabung (tabel 3).

Tabel 3: Kemampuan Menabung Penduduk Miskin dan Tidak Miskin *

	Mampu Menabung	Pas-Pasan	Tidak Mampu Menabung	Total
Miskin	10 (30,3%)	8 (24,2%)	15 (45,4%)	33 (100%)
Tidak Miskin	19 (70,4%)	4 (14,8%)	4 (14,8%)	27 (100%)
Total	29 (48,3%)	12 (20%)	19 (31,7%)	60 (100%)

Sumber: Data Penduduk

* Miskin, pendapatan di bawah Rp 70.000/kapita/bulan.

Penduduk yang termasuk miskin pun (55% dari penduduk keseluruhan), ternyata 30,3% di antaranya mampu menabung. Pada tabel 4 dapat dilihat perbedaan kemampuan menabung

dari kelompok ekonomi masyarakat desa Gadingsari.

Tabel 4: Kemampuan Menabung Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Bagian Yang Mampu Menabung (%)
PNS	63,6
Petani	59,1
Usaha Swasta	55,6
Perangkat Desa	33,3
Buruh Tani	30,0
Buruh Srabutan	0,0

Sumber: Data Penduduk

Demikian dari data hasil penelitian kecil yang mencakup 60 kk penduduk Gadingsari (dipilih secara acak) dapat disimpulkan bahwa betapapun kemiskinan masih melingkupi sebagian besar penduduk desa (55%) tetapi tidaklah dalam bentuk kekurangan pangan atau kemampuan memenuhi kebutuhan pokok. Kemiskinan disebabkan ketidakmampuan mereka mendapat (lapangan) pekerjaan yang memberikan pendapatan lebih tinggi. Tidak adanya pekerjaan di desa merupakan masalah besar bagi penduduk, sehingga sangat masuk akal jika merantau (meninggalkan desa) merupakan pemecahan terbaik bagi pemuda-pemudi desa¹⁰⁾. Tujuan “perantauan” mereka tidak hanya kota-kota Yogyakarta atau Jakarta, tetapi juga kota-kota industri di luar Jawa, seperti di Kaltim, Riau, atau bahkan ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan Timur Tengah.

Otonomi Daerah dan Otonomi Masyarakat Desa. Pertanyaan amat penting yang harus dijawab dalam era otonomi daerah mulai tahun 2001 ini adalah, apakah pemerintah desa seperti Gadingsari ini (atau masyarakat desanya) akan mampu berotonomi atau mampu mandiri dalam mengurus dan memenuhi segala kebutuhan penduduknya. Jika dilihat dari struktur APPKD TA 1999-2000 terlihat bahwa nilai PAD mencapai 95%, dan subsidi atau bantuan pemerintah di atasnya (pusat, propinsi, dan kabupaten) hanya meru-

pakan 5% saja. Ini berarti bahwa sama sekali tidak ada ketergantungan pemerintah desa Gadingsari pada subsidi/bantuan pemerintah atasan.

Ditinjau dari segi pengeluaran terlihat bahwa pengeluaran sebesar Rp 163 juta yang berarti 62% dari total pengeluaran dapat ditutup seluruhnya dari PAD. Artinya PAD desa Gadingsari dapat menjamin dilaksanakannya pembangunan yang disamping menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat juga sekaligus dapat memberikan lapangan kerja kepada buruh tani yang membutuhkan pendapatan. Memang pemerintah desa perlu makin kreatif mendisain berbagai kegiatan/proyek-proyek pembangunan yang produktif yang menyumbang pada peningkatan pendapatan masyarakat desa, misalnya berupa latihan-latihan keterampilan industri kecil dan atau kerajinan rakyat. Kegiatan-kegiatan ekonomi rakyat ini ada yang dapat terkait dengan perusahaan-perusahaan milik swasta (rakyat sebagai buruh) atau ada yang merupakan kegiatan koperasi. Di sini jelas ada kebutuhan akan lembaga-lembaga keuangan mikro untuk membiayai usaha-usaha ekonomi rakyat yang makin berkembang.

Ekonomi Rakyat dan Krismon. Bahwa ekonomi rakyat Bantul mengalami perkembangan baik termasuk pada saat-saat terjadinya krismon tahun 1998, dapat ditunjukkan antara lain dari perkembangan tabungan dan jumlah penabung di BRI Cabang Bantul (tabel 5).

Dari tabel 3 jelas bahwa ekonomi rakyat Bantul telah mengalami “perlambatan” dalam pertumbuhannya ketika terjadi krismon pada tahun 1997-1998 tetapi pada tahun 1999 sudah tumbuh kembali secara “luar biasa”. Jumlah penabung pada tahun 1998 tidak menurun tetapi meningkat 6% meskipun nilai tabungan hanya meningkat 1%. Pada tahun 1999 jumlah penabung meningkat 10% dan nilai tabungan meningkat 56%, sedangkan rata-rata tabungan naik 14% dari Rp 425.000 menjadi Rp 595.000 per penabung.

¹⁰⁾ Mubyarto (peny.), *Peluang Kerja dan Berusaha di Perdesaan*, BPFE, 1985.

Juga sangat menarik membandingkan angka-angka penghimpunan dana dari seluruh Bank di Bantul dan pemberian kredit kepada

nasabah selama periode 1993/94-1999/2000 (tabel 6).

Tabel 5: Tabungan dan Penabung di BRI Cabang Bantul, 1997-1999

Jenis Tabungan	1997		1998		1999	
	Nilai (juta Rp)	Penabung (orang)	Nilai (juta Rp)	Penabung (orang)	Nilai (juta Rp)	Penabung (orang)
Tabanas	17.829	60.916	18.310	54.486	28.281	55.962
Simpedes	51.620	106.985	55.481	123.604	85.338	140.348
Simaskot	2.874	2.257	2.264	2.704	5.126	3.176
Giro	2.342	364	3.015	359	3.337	375
Jumlah	72.323	170.158	76.056	180.794	118.745	199.486

Sumber: BPS Bantul, *Bantul Dalam Angka 1999*, hal 192.

Tabel 6: Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit Perbankan di kabupaten Bantul 1993/94-Oktober 2000

Tahun	Bantul		K/D (%)
	Dana (milyar Rp)	Kredit (milyar Rp)	
1993/94	43,1	30,5	70,8
1994/95	56,2	41,4	73,7
1995/96	68,0	54,5	80,1
1996/97	77,8	71,6	92,0
1997/98	120,4	77,8	64,6
1998/99 (T IV)	190,0	89,1	46,9
1999/00 (T III)	215,4	110,0	51,1

Sumber: BI, *Statistik Ekonomi Keuangan Daerah*, Oktober 2000, hal 7 dan 20.

Terlihat dari tabel 4 bahwa selama **krismon** 1997-99 tidak terlihat kemerosotan kegiatan ekonomi di Bantul. Bahkan dapat dilihat kenaikan penghimpunan dana maupun penyaluran kredit secara terus menerus yaitu rata-rata 32% per tahun, dan selama 1996-99 naik rata-rata 56,3% per tahun. Pada triwulan III 1999/2000 penghimpunan dana di kabupaten Bantul sebesar Rp 215,4 milyar merupakan yang terbesar no. 2 di seluruh Propinsi DIY sesudah kota Yogyakarta. Penghimpunan dana di kabupaten Sleman, Gunungkidul, dan Kulon Progo pada tahun 1999/2000 adalah berturut-turut Rp 90,3 milyar Rp 85,3 milyar dan Rp 36,6 milyar,

sedangkan khusus untuk kota Yogyakarta mencapai Rp 4,9 trilyun.

Kesimpulan. Analisis ekonomi dan keuangan pada tingkat desa dan kabupaten seperti dalam kasus Bantul menghasilkan kesimpulan optimistik tetapi sekaligus pesimistik. Bahwa krismon 1997-1999 memberikan dampak negatif yang “tidak parah” pada ekonomi rakyat dan masyarakat desa tentu menggembirakan. Dan kini hampir 4 tahun setelah krismon meledak bulan Agustus 1997, sama sekali tidak lagi terasa dampaknya. Jika ada keluhan sulitnya mencari pekerjaan bagi sarjana-sarjana di desa Gadingsari, maka kesalahan tidak dapat

dibebankan pada krismon tetapi pada kecenderungan kelebihan pendidikan sarjana yang sudah berjalan lama. Lapangan kerja bagi pencari kerja di bawah tingkat sarjana memang lebih dibutuhkan ketimbang pendidikan sarjana, lebih-lebih sarjana S2 atau S3.

Gambaran kehidupan ekonomi rakyat pada tingkat desa tetap merisaukan dalam bentuk kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dan sosial. Dalam kondisi kenaikan biaya hidup akibat inflasi, kelompok penduduk berpendapatan rendah makin berat kehidupannya, meskipun tidak tanpa harapan. Gambaran perkembangan ekonomi dan keuangan ternyata tetap menggembirakan. Yang diperlukan jelas keberlanjutan program-program pemberdayaan ekonomi rakyat ala program IDT, dengan pendampingan yang lebih intensif.

KESIMPULAN

Meskipun Indonesia sudah dikenal sebagai bangsa yang “berbudaya tinggi”, namun dalam kenyataannya pertarungan antara budaya asli dan budaya modern dari Eropa dan Amerika selalu dimenangkan oleh budaya yang datang dari luar. Budaya Indonesia yang merupakan persenyawaan budaya asli, budaya Hindu, dan Islam, ternyata belum cukup tangguh menghadapi serangan budaya modern, lebih-lebih pada tahap globalisasi akhir abad 20 dan awal abad 21.

Krisis multidimensi yang dipicu krisis moneter 1997 tidak semata-mata didorong faktor dari luar, tetapi lebih karena ketahanan budaya Indonesia belum cukup handal. Ideologi Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan (Mukadimah) UUD 1945, memang diacu sebagai landasan dan strategi pembangunan nasional. Namun demikian strategi pembangunan nasional yang handal dengan landasan ideologi nasional Pancasila dan asas kekeluargaan belum pernah benar-benar diterima dan dilaksanakan secara ikhlas oleh seluruh warga bangsa.

Reformasi yang dipicu krisis multidimensi dewasa ini terancam gagal karena setiap komponen masyarakat tidak saja tidak dirangsang untuk bekerjasama malahan cenderung bersaing sengit seakan-akan memperebutkan sesuatu bagi diri atau kelompoknya sendiri. Kasus desa Gadingsari di kabupaten Bantul yang miskin tetapi hampir sepertiga penduduk miskinnya mampu menabung, sungguh-sungguh menggambarkan “keajaiban” ekonomi rakyat yang mungkin sulit dipahami pakar-pakar ekonomi berpaham Neoklasik pasar bebas. Masalah riil yang dihadapi di perdesaan bukanlah pengangguran tetapi kurang berdayanya ekonomi rakyat yaitu mereka yang bekerja keras lebih dari 35 jam per minggu tetapi berpendapatan rendah (*the working poor*).

Visi masa depan yang jernih hanya dapat dilihat atau diproyeksikan dengan menggunakan ideologi Pancasila yang setiap pelakunya berusaha mewujudkannya dalam tindakan kongkrit kehidupan sehari-hari terutama dengan menunjuk pada ajaran-ajaran moral agama. Maka gejala ketidakmampuan bangsa mengatasi krisis yang menyerang dewasa ini membuktikan ketidakpercayaan sementara warga bangsa terhadap ideologi kerakyatan dalam Pancasila. Jika Prof. Wijoyo Nitiasastro dan Dr. Emil Salim pada awal 1966 begitu yakin akan ideologi Pancasila (*true believers*), para mahasiswa sekarang (35 tahun kemudian) rupanya kembali ragu-ragu dan masih mencari-cari alternatif lain dari ajaran/paham dari luar dengan alasan telah terjadinya globalisasi dan “kemenangan” sistem kapitalisme. Inilah masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia untuk merumuskan visi masa depannya. Di satu pihak ada keinginan menjaga dan mengembangkan semangat kebangsaan dan kepribadian bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila, tetapi di pihak lain merasa tidak berdaya dan cenderung menyerah menghadapi kekuatan kapitalisme global yang me”raksasa”.

Konflik pendapat tentang bagaimana melaksanakan reformasi, yang menuju kembali pada kesatuan dan persatuan bangsa (integrasi nasional) harus dihentikan, dan tidak boleh dibiarkan berkelanjutan. Dalam periode 1-2 tahun mendatang berbagai silang pendapat harus diatasi melalui sarasehan-sarasehan dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Asas gotong-royong dan kerakyatan yang memancar dari Pancasila harus diterapkan menuju Indonesia yang satu, Bhinneka Tunggal Ika.

DAFTAR PUSTAKA

- Herman E Daly. *Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development*, Beacon Press, Boston, 1996.
- Tubagus Feridhanusetyawan, *Survey of Recent Development*, **BIES**, Vol.32, Agustus 1997, hal. 3.
- Hall Hil. *The Indonesian Economy Since 1966: Southeast Asia's Emerging Giant*, Cambridge University Press, 1996.
- McPherson, 1985. *The Rise and Fall of Economic Justice*, Oxford, op.cit 2-3.
- Mubyarto, *Ekonomi Indonesia Dewasa Ini, Berbagai Pertanyaan Ekonom dan Orang Awam*, dalam Kompas (ed), *Mencari Bentuk Ekonomi Indonesia*, Gramedia, 1982.
- , *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*, Aditya Media, 1997.
- , *Kembali ke Ekonomi Pancasila: Pemerataan Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan*, Aditya Media, 1998.
- , *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, 2000.
- , *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, 2001.
- , *Amandemen Konstitusi dan Pergulatan Pakar Ekonomi*, edisi kedua, Aditya Media, Yogyakarta, 2001.
- Steven Redelet. *Indonesian Foreign Debt: Headed for Crisis of Financing Sustainable Growth?*, **BIES**, Vol 31, No.3, Dec 1995, p. 40.
- Seminar KAMI, *Jalur Baru Setelah Runtuhnya Ekonomi Terpimpin*, Sinar Harapan, 1984.
- World Bank, *The East Asian Miracle*, 1993, op.cit, p.158.